KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Laporan kinerja DPR RI masa sidang III tahun 2020 - 2021
Tanggal : Selasa, 16 Februari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Laporan Kinerja DPR RI Masa Sidang III Tahun 2020–2021

DPR RI Bergotong Royong Menyelamatkan dan Memulihkan Indonesia dari Pandemi Covid-19.



ANTARA/CHEMAS REVYANTO

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani membacakan rangkaian kinerja DPR RI selama masa Sidang III Tahun 2020- 2021. Dalam kesempatan tersebut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun menyampaikan sejumlah fungsi dan wakil rakyat yakni terkait fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan telah dilaksanakan secara optimal meski Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang dilanda masa pandemi virus corona (Covid-19).

"Masa persidangan ini sangatlah singkat, dan kita telah bekerja dengan optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusional dalam situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegatan Masyarakat (PPKM)," Kata Puan dalam pidatonya di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II, Lantai 4, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/2).

Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V yakni meliputi Sukoharjo, Klaten, Boyolali dan Solo ini pun lanjut memaparkan dalam aspek fungsi legislasi pihaknya telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk membahas 3 RUU.

"DPR pasti akan segera menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tutur mantan Menko PMK ini.

"DPR memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan program legislasi nasional dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional serta mendukung kebutuhan hukum untuk pembangunan nasional," tambahnya.

Pemerintah Perlu Menghemat

Pada fungsi anggaran, putri dari Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri ini pun menyampaikan pihaknya melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) difokuskan pada evaluasi capaian kinerja anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2020 dan Rencana Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2021.

"DPR dapat memahami capaian realisasi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh masa pandemi Covid-19 dan dampaknya," kata Puan.

Pada Tahun 2021, Ketua DPR RI Puan Maharani ini pun menghimbau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membutuh refocusing dan penghematan belanja, khususnya untuk kebutuhan APBN dalam penanganan Covid-19.

"DPR juga terus mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam melaksanakan Program Ekonomi Nasional yang masih menjadi sebuah prioritas pada tahu anggaran 2021 ini," sebut Puan.

Pengawasan Masalah di Masyarakat

Ditindaklanjuti Pada fungsi pengawasan, Puan pun memastikan bahwa pihaknya terus menindaklanjuti temuan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat agar dapat diselesaikan dan diturtaskan dalam waktu serta skala yang secepat mungkin.

Melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Tim Pemantau maupun Tim Pengawas dari DPR RI terus melakukan koordinasi dengan mitra kerja terkait soal solusi dan penuntasan masalah yang terjadi di masyarakat sejauh ini.

"Seperti soal Bencana Alam, Kami telah meminta kepada pemerintah agar selalu melakukan langkah antisipasi dan memperkuat upaya pencegahan terutama di daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi," tuturnya.

Vaksin Covid-19 Harus Tepat Sasaran

Vaksin untuk virus corona saat ini telah terus dipersiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Puan pun tidak lupa bahwa pihaknya memastikan bahwa distribusi dan kualitas vaksin harus sangat optimal dapat diterima masyarakat yang tepat sasaran.

"DPR mengapresiasi tetapi bagaimanapun Pemerintah harus terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait vaksin Covid-19, serta memastikan bahwa vaksin yang digunakan memang benar-benar aman dan hal," tegas Puan menyampaikan.

"Vaksin Covid-19 memberikan harapan bagi kita semua agar masa pandemi ini dapat segera berlalu meski belum terlihat kepastiannya. Oleh karena itu seb
agar melalui fun
dan memberika
kas Puan. (adv

KINERJA DPR RI MASA SIDANG III TAHUN 2020-2021

FUNGSI LEGISLASI

DPR telah menerima surat Presiden untuk membahas 3 RUU, yaitu:

1. RUU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
2. RUU tentang Praktik Psikologi.
3. RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem elektronik).

FUNGSI ANGGARAN

1. DPR Memita kepada Pemerintah agar APBN Tahun 2021 dapat lebih efektif dirasakan manfaat dan dampaknya bagi Rakyat Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan APBN 2021 Pemerintah perlu Refocusing dan penghematan agar kebutuhan pemulihan sosial rakyat lebih dipersiapkan.
3. DPR Mendukung Pemerintah dalam melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang menjadi prioritas di Tahun 2021.

FUNGSI PENGAWASAN

1. DPR RI Memastikan pemberian Vaksin Covid-19 harus tepat sasaran.
2. Ibadah haji tahun 2021 Pemerintah masih harus menunggu kebijakan resmi Pemerintah Arab Saudi mengingat Pandemi belum berakhir.
3. DPR telah menerima permintaan rapat konsultasi Lembaga Pengelola Investasi.
4. DPR Telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diajukan oleh Presiden 5. DPR Telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung.
6. DPR Telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan Hakim Ad Hoc.
7. DPR Telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
8. DPR Telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia.
9. DPR telah mendengar penjelasan Sekjen Kemkominfo mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026.
10. DPR Telah memberikan pertimbangan terhadap 4 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

• Diplomasi Parlemen dilakukan dengan mengirimkan delegasi untuk mengembangkan kerjasama dengan parlemen dan perwakilan negara sahabat.